

# MADRASAH DAN UJIAN NASIONAL (UN)

M. Imam Zamroni

## *Abstract*

*The policy of Final National Examination (UN) standardization has caused madrasah to become trapped in practical efforts to help students pass by focusing on repetitive practice of tests in the examination subjects. Learning was not a process of developing or maturing, but one of earning high test scores and passing the UN. Ironically, the development of student potential was not a priority for the teaching-learning process as a result of the high importance given to test scores. The deification of test scores and the application of the policy of standardization have resulted in the process of education causing fear in students. Finally, students experience stress and depression due to fear of failing the UN. Therefore, the policy of standardization of passing grades in the UN must be changed to reflect the spirit of decentralization and regional autonomy and appreciation of diversity of school quality and capacity for teaching and learning. Data collection methods were in-depth interviews and document analysis.*

*Keywords: standardization, examination subject, UN*

## A. Pendahuluan

Kebijakan Pemerintah tentang Ujian Nasional (UN) telah membuat lembaga pendidikan kita kalang-kabut dan terperosok dalam lubang hitam disorientasi pendidikan. Hal ini juga menimpa madrasah sebagai institusi pendidikan Islam yang mengemban dua misi sekaligus, yakni transformasi pengetahuan umum dan transformasi pengetahuan agama Islam kepada siswa. Output yang diharapkan akan

---

Drs. M. Imam Zamroni, M.Si adalah  
Peneliti pada Pusat Studi Asia Pasifik  
UGM Yogyakarta

mampu membentuk pribadi-pribadi yang berwawasan luas dan berakhlakul karimah.

Supaya dapat menggapai kelulusan dalam UN, madrasah harus mempersiapkan siswanya dengan cepat, instant dan sangat pragmatis, seperti menambah jam belajar untuk membahas materi UAN, menyelenggarakan *try out*, mendatangkan guru dari luar sekolah untuk membimbing siswa, dan lain sebagainya. Dalam prakteknya, perlakuan diskriminatif antara mata pelajaran yang di-UN-kan dan yang tidak di-UN-kan tidak bisa dihindarkan, karena madrasah selalu dibayangkan dengan tinggi standar kelulusan yang diterapkan oleh Pemerintah terutama sejak tahun 2008.

Kebijakan Pemerintah pada tahun 2008 jumlah mata pelajaran yang diujikan menjadi dua kali lipat, dari tiga menjadi enam mata pelajaran yang juga diberlakukan pada tahun 2009, yang berlaku di madrasah maupun di sekolah. Singkatnya siswa di *drill* agar bisa lulus dalam ritual tahunan yang bernama UN tanpa mempertimbangkan kapasitas dan kemampuan seorang siswa.<sup>1</sup> Ini artinya, praktik pendidikan telah terjebak pada logika pelatihan yang mekanistik dan pragmatis, sehingga akan menyebabkan involusi pendidikan,<sup>2</sup> yakni peningkatan kualitas pendidikan Islam yang hanya sebatas artifisial saja, namun belum sampai menyentuh bagian yang substansial.

Akibatnya terjadi dehumanisasi yang mengabaikan eksistensi siswa sebagai manusia pembelajar yang memiliki keragaman potensi. Lalu madrasah hanya berfungsi sebagai 'mesin' pencetak angka yang tinggi dan prestisius. Demi UN angka telah menjadi 'dewa' yang paling ditakuti oleh siswa, guru maupun orangtua siswa. Ironisnya, ketakutan dan kekhawatiran ini malah justru mendorong praktik-praktik yang tidak jujur di madrasah maupun di sekolah. Padahal UN merupakan instrumen untuk melaksanakan evaluasi terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan oleh guru, siswa dan orangtua siswa.

Menurut Anas Sudjiono ruang lingkup evaluasi meliputi tiga aspek yaitu 1) evaluasi mengenai program pengajaran; 2) evaluasi mengenai proses pengajaran; 3) evaluasi mengenai hasil belajar (hasil pengajaran).<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>M. Imam Zamroni. 2008. "UN dan Sangkar Besi Pendidikan." *Harian Seputar Indonesia*, 10 Mei.

<sup>2</sup>Harefa Andrias. 2000. *Menjadi Manusia Pembelajar*. Jakarta: Kompas, h. 60.

<sup>3</sup>Anas Sudjiono. 2001. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers, h. 29.

Melihat ruang lingkup evaluasi tersebut maka yang ditekankan adalah prosesnya yang alamiah sehingga tidak perlu melakukan *drill* sebagaimana banyak dilakukan oleh madrasah-madrasah pada umumnya untuk menghadapi UN. Hasil dari *drill* tentunya bukanlah cerminan dari proses pembelajaran yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan yang melibatkan guru, siswa dan bahkan orangtua siswa. Adanya intervensi yang berlebihan terhadap mata pelajaran yang di-UN-kan menyebabkan UN tidak bisa dijadikan tolak ukur evaluasi proses pembelajaran yang alamiah, karena telah terdistorsi dengan kegiatan-kegiatan pragmatis dan mekanis seperti pembahasan soal-soal yang terdahulu guna memprediksi soal yang akan datang, *tryout*, *drill*, bimbel (bimbingan belajar) dan lain sebagainya.

Praktik kecurangan, menipulasi dan ketidakjujuran ditemukan dalam pelaksanaan UN, baik oleh guru maupun siswa, dengan modus yang amat beragam, baik di madrasah maupun di sekolah. Ironisnya, kecurangan di dunia pendidikan tidak memandang apakah institusi pendidikan tersebut berbasis agama ataupun sekuler. Hal ini seperti kasus yang dilakukan oleh 18 guru untuk “menyelamatkan” siswanya dengan mengganti jawaban soal bahasa Inggris di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara. Di tempat yang berbeda, 5 guru di sebuah Madrasah Tsanawiyah, di Pandeglang, Banten melakukan praktik kecurangan dengan menandai 52 soal Bahasa Indonesia agar siswa terbantu dalam mengerjakannya. Akhirnya, guru tersebut ditetapkan sebagai tersangka kebocoran soal UN.<sup>4</sup> Potret tersebut menandakan bahwa, guru tidak kalah gelisah dibandingkan dengan siswa dalam menghadapi ritual tahunan yang disebut dengan UN di setiap madrasah, baik sekolah favorit yang memiliki fasilitas pembelajaran yang memadai, maupun sekolah “tertinggal” dengan fasilitas minim dan serba terbatas.

Dalam kasus ini, tentunya kita tidak bisa serta-merta menyalahkan guru yang mempunyai empati sosial (*social emphatic*) dan rasa khawatir terhadap anak didiknya dan upaya untuk mempertahankan nama baik madrasah, akan tetapi tindakan tersebut dipicu oleh kebijakan Pemerintah yang “antirealitas”, sehingga menimbulkan kegelisahan dan keresahan. Tidak sedikit kondisi madrasah yang masih dalam keadaan terpuruk, fasilitas minim dan gedung rusak parah, namun di dalamnya masih

---

<sup>4</sup> *Harian Umum Kompas*, 03 Mei 2008

berlangsung proses belajar mengajar, padahal membahayakan keberadaan guru dan murid yang ada di dalamnya. Fasilitas yang minim tentunya mempunyai pengaruh yang besar terhadap kualitas pembelajaran yang diselenggarakan dan *output* yang dihasilkan.

Di pusat-pusat perkotaan seperti Jakarta, Semarang, Surabaya dan Medan masih banyak gedung madrasah yang tidak layak pakai, apalagi di daerah pinggiran dan daerah pelosok tentu lebih banyak lagi. Data dari Depdiknas hasil Rembuknas Pendidikan 2007 menunjukkan pada tahun 2003 terdapat 531.186 ruang kelas yang rusak, dan sejumlah 360.219 telah diperbaiki, sisanya diperbaiki pada tahun 2008. Dari sejumlah ruangan madrasah maupun sekolah yang rusak tersebut, 52 persen atau sekitar 276.695 unit berada di pulau Jawa. Hal ini masih ditambah dengan tingginya angka putus sekolah (*drop out*) di tingkat sekolah dasar. Tercatat tahun 2002/03-2003/04 sebanyak 767.835 siswa, tahun 2003/04-2004/05 sebanyak 777.010 siswa, tahun 2004/05-2005/06 sebanyak 824.684 siswa dan tahun 2005/06-2006/07 sebanyak 615.411 siswa<sup>5</sup> yang menjadi faktor utama penyebab tingginya angka putus sekolah adalah masalah keterpurukan ekonomi masyarakat.

Akibat keterpurukan ekonomi tersebut juga menyebabkan buruknya kondisi madrasah, terutama gedung madrasah sebagai sarana pembelajaran, ruang perpustakaan maupun fasilitas yang lainnya. Minimnya fasilitas pembelajaran mempunyai dampak yang amat serius bagi prestasi siswa dan peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Adanya kebijakan standarisasi kelulusan UN yang masih dirasakan cukup tinggi bagi madrasah-madrasah terbelakang mengakibatkan mereka merasa tertekan. Adalah suatu kewajaran bila adanya “tekanan” dari Pemerintah untuk memenuhi standar kelulusan tersebut mengakibatkan munculnya inisiatif untuk mencari “jalan pintas” dengan cepat dan instant. Pendeknya UN juga menjadi pemicu berkembangnya mental pragmatisme di madrasah, terutama di kalangan siswa.

Dalam proses penyelenggaraan pembelajaran yang bertumpu pada pengejaran angka dan standar kelulusan, siswa tidak ditempatkan sebagai subyek pembelajaran dan pribadi-pribadi unik yang memiliki keragaman potensi yang seharusnya dikembangkan, akan tetapi sebagai obyek yang harus menguasai berbagai macam materi UN tanpa mempertimbangkan kapasitas siswa secara manusiawi. Inilah yang

---

<sup>5</sup> Dokumen Depdiknas, 2008

disebut dengan konsep pendidikan gaya bank (*banking concept of education*) yang dapat membius dan mematikan daya kreatif siswa.<sup>6</sup> Akhirnya siswa mengalami gelisah, stress, frustrasi, bahkan depresi karena dihindangi rasa takut dan malu jika gagal dalam UN. Berdasarkan pertemuan dengan beberapa guru, tidak sedikit siswa yang sedih dan menangis setelah keluar dari ruangan dalam pelaksanaan UN karena tidak dapat mengerjakan soal yang diujikan pada mata pelajaran tertentu, padahal menurutnya, dalam satu tahun terakhir ini ribuan soal telah dipelajarinya, namun hanya sedikit sekali yang keluar dalam soal ujian. Menurut Pierre Bourdieu, inilah adalah praktik kekerasan simbolik (*symbolic violence*) yang amat berbahaya bagi perkembangan psikologis siswa.<sup>7</sup> Paulo Freire menganggap hal itu sebagai praktik dehumanisasi (*dehumanization*) di dunia pendidikan yang bertentangan dengan fitrah manusia yang bebas dari kekangan.<sup>8</sup> Praktik pembelajaran yang demikian juga mempunyai dampak psikologis yang dapat mengganggu perkembangan mental anak (*mental disorder*) dalam mengarungi kehidupan tahap selanjutnya.<sup>9</sup>

Tulisan ini hendak mendiskusikan dampak yang ditimbulkan adanya kebijakan standarisasi kelulusan yang masih dianggap oleh madrasah terlalu tinggi, sebagai institusi pendidikan Islam yang mengemban dua misi sekaligus, mengajarkan agama Islam dan pengetahuan umum. Bagaimana kegelisahan guru, siswa dan orangtua siswa dalam menghadapi ritual tahunan yang bernama UN? Terkait dengan kebijakan pemberlakuan standarisasi kelulusan dalam UN, kajian-kajian yang ada hanya bersifat normatif, hanya melakukan analisis kebijakan dan tidak melihat realitas praksis pendidikan, seperti yang dilakukan oleh Zakaria,<sup>10</sup> dan Darmaningtyas.<sup>11</sup> Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Benediktus

---

<sup>6</sup> Paulo Freire. 2000. *Pendidikan Kaum Tertindas*. Jakarta: LP3ES, h. 55

<sup>7</sup> Pierre Bourdieu dan Jean-Claude Passeron. 1990. *Reproduction in Education, Society and Culture*. London: Sage Publications, h. 1

<sup>8</sup> Paulo Freire. *Op. Cit.* h. 19

<sup>9</sup> Marsana Windhu. "Dimensi Kekerasan Tinjauan Teoritis Atas Fenomena Kekerasan." dalam Franz Magnis Suseno (ed). 2000. *Malawan Kekerasan Tanpa Kekerasan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 14

<sup>10</sup> Teuku Ramli Zakaria. 2005. *Ujian Nasional dan Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan*. Jakarta: Pusat Penilaian Pendidikan Balitbang Depdiknas.

<sup>11</sup> Darmaningtyas. 2007. "Realitas Pemberlakuan UAN/UN." *EDUKASI Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*. Vol. 5 (1), hh. 41-54.

Widi Nugroho,<sup>12</sup> mencoba untuk menguraikan dampak buruk UN hanya sebatas pada lingkup sekolah saja. Tidak melihat apa yang terjadi di madrasah sebagai institusi pendidikan Islam yang harus menjalankan UN. Tulisan ini berusaha untuk melihat dua sisi, kebijakan dan pelaksanaannya, dengan melihat fenomena pemberlakuan UN di madrasah. Tulisan ini lebih bersifat evaluatif dan refleksi kritis terhadap pemberlakuan UN di madrasah.

### B. Perubahan kebijakan UN dan implikasinya

Dalam satu dekade terakhir kebijakan pemerintah di dunia pendidikan terus berubah, seperti perubahan nama UN yang terus-menerus, padahal substansinya sama. Adapun implikasi kebijakan tentang UN tersebut sebagaimana digambarkan oleh Darmanintyas (2007), Ujian Negara (1945-1971), Ujian Sekolah (1971-1983), dan EBTANAS (Evaluasi Belajar Nasional, 1983-2002). Kemudian tahun 2002/2003 Pemerintah mengganti EBTANAS dengan UAN (Ujian Akhir Nasional) dan setelah satu tahun 2003/2004 kemudian diganti lagi menjadi UN (Ujian Nasional) meskipun substansinya sama. Ibarat kacang hanya berubah kulitnya saja, namun rasa, aroma dan kualitasnya tetap sama tanpa ada inovasi dan kebaruan yang berarti, karena pola penerapannya masih sentralistik dan mengabaikan kapasitas madrasah yang beragam yang ada di berbagai daerah.

Di dalam kebijakan UN, Pemerintah dalam beberapa tahun terakhir selalu menaikkan standar kelulusan, mulai dari tahun 2002/2003 standar nilainya 3,01 dan pada tahun 2007/2008 standar nilainya 5,01. Ironisnya, peningkatan standar kelulusan dalam UN yang sudah diterapkan dalam lima tahun terakhir tidak diiringi dengan penyediaan kelengkapan fasilitas pembelajaran di madrasah, terutama madrasah yang berada di daerah terpencil. Singkatnya, madrasah hanya “dipaksa” untuk memenuhi standar kelulusan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah tanpa dibarengi dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang dan penelitian-penelitian terhadap kondisi riil madrasah yang ada di Indonesia. Sehingga siswa kemudian menjadi komoditas bagi lembaga-lembaga bimbingan belajar yang seolah-olah menjanjikan keberhasilan dalam menempuh UN yang semu dan absurd.

---

<sup>12</sup> Benediktus Widi Nugroho. 2008. “Dampak Buruk Ujian Nasional terhadap Siswa, Guru dan Sekolah.” *Basis*. No. 07-08 (57), Juli-Agustus, hh. 38-43

Sejauh pengetahuan penulis, sampai tahun 2008 belum ada penelitian yang membuktikan bahwa peningkatan standar kelulusan dapat sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Padahal dampak dari kebijakan tersebut telah mengakibatkan semakin banyaknya praktik tindakan kriminal dan kecurangan-kecurangan di lingkungan pendidikan saat UN sedang berlangsung dan tentunya telah merusak moralitas pendidikan di Indonesia.

Guru, siswa dan pihak-pihak terkait akhirnya “berkompromi” untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan secara hukum untuk mendapatkan predikat lulus dengan nilai yang tinggi. “Jalan pintas” dan praktik-praktik inkonstitusional tersebut seolah-olah dianggap “sah dan pantas”, meskipun telah mencoreng dunia pendidikan dan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Jika kebijakan standarisasi kelulusan yang tinggi tidak diimbangi dengan peningkatan fasilitas pembelajaran dan peningkatan kualitas tenaga pendidik, maka niscaya madrasah sebagai institusi pendidikan Islam dan bahkan sekolah pada umumnya akan semakin kreatif dalam melakukan praktik-praktik manipulatif dan kompromistik yang akan mengakibatkan terjadinya demorasisasi bangsa. Madrasah mempunyai kontribusi penting terhadap moralitas bangsa ini, karena ia membekali lulusannya dengan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai agama Islam.

Di samping itu, meskipun UN dapat memacu motivasi siswa untuk belajar, akan tetapi beban sosial dan psikologis yang ditanggung oleh siswa dan guru terlalu tinggi. Siswa akan malu jika tidak dapat lulus dengan standar kelulusan yang sudah ditetapkan, begitu pula dengan guru akan merasa sangat malu jika ada siswanya yang tidak lulus dan tentunya secara institusional lembaga madrasah juga akan tercoreng. Implikasinya, madrasah yang bersangkutan juga akan semakin sulit mendapatkan siswa pada tahun ajaran baru karena madrasah yang bersangkutan dianggap sebagai madrasah yang tidak berkualitas atau merusak reputasi madrasah, dan jika keadaan ini dibiarkan, maka akan semakin banyak madrasah yang akan “mati”, terutama madrasah-madrasah swasta karena tidak mendapatkan siswa, yang memberikan kontribusi terpenting bagi pembiayaan madrasah. “Nafas kehidupan” madrasah swasta adalah dari banyaknya siswa yang diperolehnya saat tahun ajaran baru, karena sebagian besar biaya pendidikan ditanggung oleh orangtua siswa.

Berangkat dari persoalan itulah maka, model evaluasi yang diterapkan dalam UN harus dirubah, dengan mempertimbangkan kondisi riil madrasah dengan memberikan perlakuan (*treatment*) yang berbeda bagi madrasah yang “kurang mampu” yang didasarkan pada prinsip desentralisasi pendidikan yaitu: memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah Daerah dalam kebijakan pada sektor pendidikan khususnya.<sup>13</sup> Sentralisasi evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah telah mengabaikan keragaman kualitas pendidikan pada level praksis, karena disparitas kualitas madrasah yang berada di pusat perkotaan dan di pelosok pedesaan tidak bisa diabaikan. Perumusan kebijakan yang menekankan pada aspek lokalitas tentunya memerlukan penelitian yang mendalam yang didukung dengan data-data yang valid. Maksud dari desentralisasi pendidikan yakni sesuai dengan UU No.5/1974 yang telah disempurnakan dengan UU No.22/1999 dan UU No.25/1999. Desentralisasi pendidikan sudah disosialisasikan sejak tahun 1980an oleh Mendiknas. Bank Dunia dalam hal ini juga mendukung diberlakukannya kebijakan desentralisasi pendidikan di 40 negara berkembang.<sup>14</sup> Seiring dengan itu, madrasah-madrasah yang masih dalam kondisi memprihatinkan harus mendapatkan bantuan yang memadai dari pemerintah karena beban mereka akan semakin berat dengan kebijakan standarisasi UN yang begitu tinggi.

### C. Potret Kegelisahan Madrasah

Selain kurikulum, terdapat beberapa elemen penting yang dapat menunjang prestasi siswa di madrasah yaitu; guru, siswa, fasilitas pembelajaran dan partisipasi orangtua siswa. Paling tidak antara guru dan orangtua siswa harus sinergis untuk mendorong anak-anaknya giat belajar dan berprestasi, namun dalam masyarakat pedesaan pendidikan anak masih dibebankan oleh madrasah seutuhnya. Partisipasi masyarakat untuk men-*support* anak-anaknya di madrasah rendah sekali. Madrasah dianggap sebagai “mesin” yang dapat memproduksi dan mencetak anak-anak dari bodoh menjadi pintar, dari idiot menjadi cerdas, dari tidak tahu menjadi tahu dan dari tidak agamis menjadi agamis. Dalam

<sup>13</sup> Fasli Jalal dan Dedi Supriyadi (Editor). 2001. *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita, h. 122

<sup>14</sup> Bjork, Christopher. 2005. *Indonesian Education; Teacher, Schools, and Central Bureaucracy*. New York and London: Routledge, hh. 1-2

kasus UN, tulisan ini akan menyoroti tiga hal, yaitu guru madrasah yang mempunyai beban ganda, siswa dan orangtua siswa. Ketiga komunitas ini yang paling resah dan gelisah terhadap kebijakan standarisasi kelulusan dalam UN, sehingga menyebabkan anak menjadi stress bahkan depresi dan dalam banyak kasus mendorong mereka untuk mengambil jalan pintas guna menuai kesuksesan menempuh UN.

### 1. *Guru Madrasah*

Mengingat peran strategis guru dalam setiap upaya peningkatan mutu, relevansi dan efisiensi pendidikan, maka guru harus profesional dan berkualitas baik. Kemajuan prestasi siswa banyak bergantung pada kepiawaian guru dalam membelajarkan siswa,<sup>15</sup> serta lingkungan pembelajaran yang mendukung proses belajar mengajar. Ketergantungan siswa terhadap peran guru dalam peningkatan prestasi dan kemajuan siswa menjadikan tanggungjawab guru semakin besar dan kian berat, meskipun hak yang diterima (insentif), terutama guru swasta, relatif kecil dan tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dalam keluarganya mereka harus melakukan kerja sampingan di luar jam sekolah.<sup>16</sup> Antara guru swasta dan guru negeri terdapat kesenjangan kesejahteraan sosial yang teramat dalam, meskipun berbagai kebijakan publik untuk mensejahterakan kehidupan guru swasta, namun dalam praktiknya masih jauh dari harapan.

Dalam konteks pelaksanaan UN di madrasah, keberadaan guru dianggap sebagai sosok yang paling bertanggungjawab terhadap prestasi siswa. Hampir di seluruh madrasah, baik tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), maupun Madrasah Aliyah (MA), guru yang mengampu mata pelajaran yang diujikan dalam UN menambah jam pelajaran guna membahas soal-soal yang telah di-UN-kan pada tahun-tahun yang telah lalu, bahkan dalam praktiknya guru juga membuka lembaga bimbingan belajar guna membantu para siswa untuk mendapatkan nilai tinggi dalam UN. Proses pembelajaran dengan menggunakan media soal-soal ujian hanya bersifat prediksi dengan harapan yang sangat tinggi bahwa soal yang dipelajari akan diujikan kembali dalam

---

<sup>15</sup> Dedi Supriyadi. 2000. *Mengangkat Citra dan Martabat Guru*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, h. 179

<sup>16</sup> M. Imam Zamroni. 2008. "Kesejahteraan Guru Masalah Klasik Pendidikan Kita." *Harian Seputar Indonesia*, 29 Januari.

UN yang akan diikuti oleh siswa-siswanya dan jika soal-soal yang sudah dipelajari tersebut tidak keluar dalam UN, maka siswapun akan kecewa, sedih, menangis bahkan sampai depresi karena tidak mampu mengerjakan soal dalam UN.<sup>17</sup> Pendeknya, pendidikan bagi siswa yang menghadapi UN merupakan proses yang menakutkan dan bukan proses yang menyenangkan. Guru juga akan sangat gelisah dan khawatir jika mengetahui siswanya mempunyai kemampuan yang minim dalam proses pembelajaran yang dilakukan, sehingga mendorong guru untuk melakukan pengulangan-pengulangan materi pelajaran,<sup>18</sup> bahkan melakukan tindakan-tindakan amoral dan anti kejujuran, seperti yang dilakukan oleh 18 guru SMA Negeri Lubuk Pakam II.

Fenomena yang dilakukan oleh para guru di madrasah, baik MI, MTs, maupun MA, dalam menghadapi UN terdapat dua usaha yang dilakukan yaitu usaha rasional dan usaha spiritual. *Pertama*, usaha rasional seperti menambah jam pelajaran, membuat les privat, memberikan materi soal ujian terdahulu dan membahasnya, mengadakan *try out*, mengikuti bimbingan belajar, dan melakukan *drill* terhadap soal-soal ujian terdahulu. Menjelang pelaksanaan UN di dalam madrasah pun telah terjadi diskriminasi mata pelajaran yang cukup ketat, antara mata pelajaran yang diujikan dalam UN dengan mata pelajaran yang tidak di-UN-kan. Mata pelajaran agama sudah tidak menjadi prioritas pembelajaran ketika siswa sudah mendekati masa UN atau setelah mereka memasuki tahun terakhir di madrasah. Padahal mata pelajaran agama Islam merupakan identitas madrasah yang membedakan dengan sekolah umum. Identitas madrasah ini mulai tereduksi dengan diberlakukannya UN dalam lima tahun terakhir.

*Kedua*, usaha spiritual dilakukan oleh guru, siswa, orangtua bahkan juga masyarakat dengan mengadakan ritual-ritual keagamaan seperti *istighotsah*, *mujahadah*, membaca *wirid*, sholat *dhuba* bersama dan melakukan ritual di tengah malam seperti sholat *tabajud* dan lain sebagainya. Memang tradisi keagamaan seperti di atas sudah berlangsung lama dengan tujuan untuk *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah Swt. Akan tetapi selama lima tahun terakhir tradisi keagamaan tersebut

<sup>17</sup> M. Imam Zamroni. 2008. "Wajah Stres Pendidikan Kita." *Harian Kompas*, 22 April.

<sup>18</sup> Ivan Illich. 2000. *Bebaskan Masyarakat dari Belenggu Sekolah*. Jakarta: Yayasan Obor, h. 134

mengalami disorientasi, yakni sebagai sarana untuk memohon kepada Allah Swt agar anak-anak mereka dapat lulus dalam UAN. Guru menjadi penggerak untuk merevitalisasi tradisi keagamaan di madrasah untuk kesuksesan anak-anak mereka. Fenomena ini tidak ditemukan di Negara-negara lain, karena tradisi ini merupakan salah satu kecerdasan lokal yang dimiliki oleh masyarakat.

Kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru menjadi sangat pragmatis, bahkan terkadang madrasah juga memfasilitasi dengan menghadirkan tutor/fasilitator dari lembaga bimbingan belajar ke madrasah untuk membimbing mengerjakan soal latihan UN yang sudah disediakan atau mengadakan *try out*. Ini menandakan bahwa guru madrasah sudah tidak percaya diri lagi untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, mereka lebih mempercayai lembaga bimbingan belajar, dimana secara paradigmatik proses pendidikan yang diterapkan antara sekolah/ madrasah dengan lembaga bimbingan belajar sangat berbeda. Didirikannya madrasah bertujuan untuk menghasilkan manusia yang berkualitas dan berakhlakul karimah sedangkan didirikannya bimbel hanya untuk menambah intensitas belajar anak.

Menurut penuturan guru MTs di Jawa timur, madrasah mengalokasikan dana yang cukup besar untuk menunjang mata pelajaran yang di-UN-kan sedangkan mata pelajaran yang lain lebih kecil anggarannya. Ironisnya, Komite Madrasah sebagai pengganti BP3 yang berperan dalam penganggaran (*budgeting*) di madrasah, juga menyetujui alokasi dana madrasah yang mempunyai efek diskriminatif terhadap mata pelajaran yang ada di madrasah dan berimbas pada “pengucilan” terhadap mata pelajaran yang tidak di-UN-kan. Diskriminasi yang dilakukan oleh para guru terhadap mata pelajaran yang ada di madrasah tidak dipikirkan implikasi jangka panjangnya terhadap siswa dan identitas madrasah yang tereduksi secara sistematis. Tujuan guru hanya satu, para siswanya lulus dan mendapatkan nilai yang tinggi.

Diskriminasi mata pelajaran ini juga menimbulkan kesenjangan pemahaman siswa terhadap mata pelajaran yang diunggulkan dan yang diremehkan. Akibat pemberian insentif yang berbeda—antara mata pelajaran yang di-UN-kan dengan yang tidak di-UN-kan—juga menimbulkan kecemburuan sosial dikalangan para guru. Guru yang tidak mengajarkan mata pelajaran yang terdaftar dalam UN, berarti juga tidak mempunyai kesempatan untuk menambah jam pelajaran atau les privat yang berarti bahwa, mereka tidak mempunyai kesempatan

untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Akibatnya konflik internal yang bersifat laten dan menyebabkan hubungan sosial (*social relations*) di antara guru yang sudah lama terbangun menjadi kurang harmonis dan menyebabkan munculnya pergunjingan sosial di antara para guru.

## 2. *Siswa Madrasah*

Peserta UAN tahun 2008 sekitar 2,26 juta siswa. Adanya UN selain mendorong intensitas belajar siswa juga mengalami stres, gelisah bahkan juga depresi. Penambahan mata pelajaran dan peningkatan standar kelulusan tersebut ditujukan untuk peningkatan kualitas pendidikan, akan tetapi tahun ini jumlah kelulusan ditingkatkan SLTA mengalami penurunan yaitu 92,5 persen. Padahal tingkat kelulusan tahun lalu mencapai 93 persen dengan perincian 95,1 persen tingkat kelulusan untuk ujian nasional mata pelajaran IPA, IPS 90,7 persen dan Bahasa 92,1 persen.<sup>19</sup> Di madrasah siswa mempunyai beban ganda, yakni mempelajari mata pelajaran umum dan mata pelajaran keagamaan.

Banyaknya pelajaran yang harus diterima oleh siswa di madrasah membuat para siswa berpikir bahwa jam belajar yang ada di madrasah tidak mampu untuk menguasai dan memahami materi yang ada. Akhirnya para siswa yang mampu dari sisi finansial, mengikuti berbagai macam bimbingan belajar agar rasa takut, stres dan khawatir akan kegagalan dalam UN dapat berkurang. Porsi belajar di rumah juga ditingkatkan demi pencapaian kelulusan. Pendeknya, tidak ada waktu senggang, bersantai maupun bermain bagi para siswa menjelang pelaksanaan UN, semua gerak-langkah dan pikiran ditujukan untuk memperoleh angka yang tinggi (nilai). Saat ini nilai yang tinggi masih dianggap sebagai dewa penyelamat bagi perjalanan seseorang maupun karir di dunia pendidikan.

Oleh karenanya, beban psikologis yang berlebihan dirasakan oleh siswa, menyebabkan pendidikan semakin memberatkan dan bukan menjadi suatu proses yang menyenangkan, dan membebaskan. Akibat beban psikologis yang terlalu berat bagi seorang siswa yang masih membutuhkan “ruang” untuk bermain, terkadang mereka juga mengalami gangguan kesehatan fisik sehingga proses belajar menjadi tidak optimal. Berdasarkan penuturan beberapa orangtua siswa yang saya temui, mengatakan bahwa anak-anaknya jatuh sakit setelah menempuh UN

<sup>19</sup> <http://www.tempointeraktif.com>

karena kegiatan belajar yang sangat padat dan mengabaikan kapasitas anak yang masih memiliki keterbatasan kekuatan fisik maupun psikis.

Kegelisahan siswa diharapkan dapat diminimalisir dengan melakukan ritual-ritual keagamaan sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing, seperti *istighotsah*, *sholat dhuha*, *mujahadah* dan lain sebagainya. Fenomena inilah yang tampak diberbagai madrasah dalam menghadapi UN. Bahkan tak jarang mereka juga melakukan ritual keagamaan secara personal agar dapat lulus dan mendapatkan nilai yang tinggi setelah usaha secara rasional dilakukannya. Pendeknya siswa merupakan kelompok yang paling gelisah dibandingkan dengan kelompok guru maupun kelompok orang tua.

Rasa gelisah yang dirasakan oleh siswa terkadang termanifestasi dalam berbagai kegiatan positif seperti mengadakan berbagai macam aktifitas spiritual. Tetapi terkadang juga tersalurkan dalam kegiatan yang notabene negatif seperti mempersiapkan berbagai strategi untuk melakukan kecurangan-kecurangan dalam menempuh UN. Dorongan dari orangtua siswa maupun motivasi dari guru di madrasah menjadi sangat penting agar kekhawatiran siswa dapat tersalurkan pada kegiatan-kegiatan yang positif.

### 3. *Orangtua Siswa*

Orangtua mencurahkan semua perhatiannya untuk mengurangi rasa khawatir terhadap anak-anaknya menjelang pelaksanaan UN dengan mendorong mereka untuk meningkatkan aktifitas belajarnya di rumah maupun di lembaga bimbingan belajar. Orangtua yang mampu secara *financial* terkadang menyuruh anaknya mengikuti bimbingan di beberapa tempat dalam satu waktu. Praksis, di dalam dunia anak-anak tidak ada waktu luang menjelang pelaksanaan UN. Orangtua, siswa dan lembaga bimbingan diwarnai dengan aktifitas pembelajaran yang menekankan pada repetisi soal-soal ujian. Setidaknya ini memberikan sinyal yang baik terhadap perkembangan partisipasi masyarakat dalam pendidikan dan adanya sinergitas antara lembaga pendidikan formal, non formal dan informal.

Kekhawatiran dan gelisahan yang dirasakan oleh para orangtua siswa terkadang juga menimbulkan pemaksaan-pemaksaan terhadap anak-anak mereka untuk terus belajar untuk menghadapi UN. Mereka ketakutan jika anak-anak mereka tidak lulus di ujian akhir yang mereka ikuti.

Di dalam partisipasi masyarakat di dunia pendidikan, terdapat perubahan yang tampak yakni, partisipasi orangtua siswa yang semula hanya dilakukan dengan cara-cara rasional seperti meningkatkan kuantitas dan kualitas belajar di rumah. Saat ini orangtua juga melakukan ritual keagamaan dalam menghadapi UN seperti mengerjakan puasa sunnah senin dan kamis, maupun melaksanakan tradisi selamatan. Pendeknya partisipasi orangtua siswa dalam pendidikan anak-anak telah berhasil mengintegrasikan antara aspek rasional dan spiritual, aspek lahiriyah dan batiniah. Uniknyanya, jika dirunut latar belakang partisipasi orangtua tersebut karena sikap pasrah pada nasib atau perasaan fatalistik yang menghantui orangtua ketika mengetahui kemampuan anak-anaknya dan tingginya standar kelulusan yang diberlakukan.

Sikap fatalistik inilah yang mendorong semakin masifnya partisipasi orangtua dalam praktik ritual keagamaan untuk mendukung praksis pendidikan anak-anaknya. Di satu sisi memang hal ini dapat memberikan pencerahan spiritual dan peningkatan keimanan seseorang, namun di sisi lain hal ini juga dapat melemahkan usaha rasionalnya, karena mereka akan beranggapan bahwa semua sudah ditakdirkan dan diatur oleh Yang Maha Kuasa. Praktik pendidikan dan ritual keagamaan seharusnya didasarkan pada kesadaran individual dan panggilan hati nurani seseorang dan bukan didasarkan pada situasi dan kondisi terpaksa, karena kesadaran merupakan proses dialogis dalam diri seseorang dalam upaya memecahkan masalah yang dihadapi secara bersama-sama.<sup>20</sup> Inilah yang harus dirubah terkait dengan pengembangan dan kontinuitas partisipasi masyarakat dalam praksis pendidikan.

#### **D. Dari Kesadaran Naif ke Kesadaran Magis**

Perubahan-perubahan partisipasi masyarakat di dunia pendidikan dalam konteks pelaksanaan UN terdapat tiga paradigma yang dapat digunakan yaitu, *paradigma konservatif*, yang menekankan pada aspek individu/subyek jika terdapat suatu persoalan, *paradigma liberal* yang beranggapan bahwa masalah masyarakat dan pendidikan adalah dua masalah yang berbeda dan *paradigma kritis*, yang memandang bahwa

---

<sup>20</sup> William A Smith. 2001. *Conscientizacao; Tujuan Pendidikan Paulo Freire*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 4

proses pendidikan sebagai arena melakukan refleksi kritis terhadap persoalan-persoalan yang muncul. Adapun ketiga paradigma tersebut mempunyai implikasi tiga kesadaran yaitu *kesadaran magis* yang mengandalkan aspek kekuasaan supra natural/kausa prima (takdir) dalam memandang suatu masalah, *kesadaran naif*, yang memandang aspek manusia yang menjadi penyebab masalah yang muncul dalam masyarakat dan *kesadaran kritis*, yang melihat sistem dan struktur sebagai penyebab problematika yang muncul di masyarakat.<sup>21</sup>

Kegelisahan orangtua yang diiringi dengan peningkatan kesadaran mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan merupakan wujud penguatan sosial untuk transformasi praksis pendidikan. Munculnya aspek religius dalam partisipasi masyarakat mempunyai dampak positif terhadap pengembangan spiritual seseorang, meskipun dalam keadaan terpaksa. Hampir tidak ada jalan keluar yang diperoleh atau jawaban yang pasti untuk menghadapi UN, baik guru, orangtua siswa dan siswa yang bersangkutan, maka mereka menambatkan segala keinginannya kepada kekuatan supranatural Sang Penguasa Alam ini, meski hanya bersifat temporer, karena usaha dan jerih payah yang dilakukan telah menguras seluruh tenaga dan pikiran yang terkadang berimbas pada melemahnya aspek psikologis dan fisik anak.

Sinyal partisipasi ini juga harus dikembangkan ke arah yang lebih luas untuk pengembangan pendidikan, karena partisipasi masyarakat merupakan modal sosial (*social capital*) yang amat berharga dan dapat memberikan kontribusi yang sangat penting dalam pembangunan pendidikan, ekonomi, sosial, budaya dan politik. Membangun dari bawah lebih menjanjikan hasilnya daripada membangun dari atas, sebagaimana yang pernah dilakukan pada masa Orde Baru. Inisiatif lokal dan keragaman lokal lebih mudah diapresiasi dan diberdayakan.

Terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pendidikan anak-anaknya, terdapat sinyal perubahan kesadaran, dari rasional ke religius atau meminjam istilah Paulo Freire, dari *kesadaran naif* ke *kesadaran magis*. Mereka yang semula hanya mengandalkan ikhtiar secara rasional dan *jasadiyah* berubah menjadi ikhtiar secara religius karena tidak mampu lagi mengkalkulasi secara rasional persoalan-persoalan yang

---

<sup>21</sup> Mansour Fakhri, dkk. 2001. *Pendidikan Populer; Membangun Kesadaran Kritis*. Yogyakarta: Insist, hh. 18-23.

dihadapinya. Oleh karenanya fenomena tersebut harus mendapatkan penguatan rasional agar partisipasi masyarakat menjadi lebih terintegrasi dan mempunyai dampak positif bagi pengembangan keagamaan seseorang dan usaha lahiriyah yang dilakukan. Mereka tidak lagi terjebak pada kubangan kesadaran magis yang hanya mengandalkan kekuatan supranatural, bersikap pasrah dan terkesan “mengkambinghitamkan” takdir jika mengalami kegagalan, sehingga semakin memperkuat virus sikap fatalistik yang mulai tumbuh dan berkembang.

Indikator peningkatan peran serta masyarakat dalam dunia pendidikan yang berangkat dari kegelisahan dan kekhawatiran merupakan hal baru dalam pendidikan di Indonesia. Karena dalam menghadapi kompetisi global sekolah saja tidak akan pernah cukup, perlu upaya-upaya komplementer untuk menciptakan kualitas sumber daya manusia yang baik seperti halnya mengintegrasikan antara gerak rasional dan spiritual. Sebagaimana yang terjadi saat ini diberbagai madrasah yang ada di Indonesia.

#### **E. Penutup**

Guru, siswa dan orangtua siswa merupakan elemen penting dalam praksis pendidikan di madrasah. Untuk menunjang keberhasilan siswa dalam meningkatkan prestasinya maka usaha yang dilakukan guru harus bersinergi dengan orang tua. Dalam konteks pelaksanaan UN terlihat dengan jelas tercipta sinergi antara guru dan orangtua siswa namun masih dalam tataran pragmatis yang disebabkan karena kegelisahan dan kekhawatiran orangtua ketika anak-anaknya hendak mengikuti UN. Hal ini perlu ditingkatkan partisipasinya ke arah yang lebih substantif dan juga selalu dijaga aspek sustainabilitasnya.

Dalam kasus UN, tidak sedikit siswa yang mengalami stres dan depresi karena dibayang-bayangi dengan standar kelulusan yang tinggi, karena para siswa tersebut banyak yang memiliki kemampuan dan kapasitas yang rendah akibat fasilitas pendidikan yang minim. Maka diperlukan adanya dukungan dari Pemerintah terhadap madrasah maupun sekolah yang masih terbelakang dengan meningkatkan fasilitas pembelajaran, infrastruktur sekolah dan peningkatan kualitas tenaga pengajar yang ada di madrasah. Tanpa hal ini, maka UN hanya akan menjadi momok bagi para guru, siswa, dan orangtua siswa, sehingga pendidikan di madrasah menjadi suatu proses yang menakutkan.

Jika sekolah sudah ditunjang dengan berbagai fasilitas pembelajaran yang memadai, maka niscaya praktik-praktik kecurangan yang selama ini kita temukan dan wajah stress siswa ketika hendak menghadapi UN akan sirna, dan pendidikan pun menjadi proses yang menyenangkan bagi para siswa. Para *stakeholder* pendidikan hendaknya tidak hanya menuntut madrasah untuk memenuhi kebijakan standarisasi yang sudah ditentukan, namun juga memberikan fasilitas yang memadai untuk menunjang pembelajaran. Karena madrasah memiliki beban ganda, mengajarkan ilmu agama dan ilmu umum.

Anak-anak akan kembali tersenyum dan riang gembira dalam proses belajar di madrasah yang diikutinya. Praksis pembelajaran tidak lagi menjadi proses yang menakutkan dan menegangkan akan tetapi menjadi suatu hal yang menyenangkan dan menggembirakan bagi anak-anak. Pendidikan pada hakekatnya tidak hanya sekedar mengejar target untuk menyelesaikan materi yang ada dalam waktu tertentu, pendidikan juga tidak hanya sekedar sebagai media untuk transfer ilmu pengetahuan (*transformation of knowledge*) tetapi juga transfer nilai-nilai keagamaan (*transformation of religious values*), sehingga akan menghasilkan sumber daya manusia yang berpengetahuan luas dan berakhlakul karimah. Revitalisasi identitas madrasah ini menjadi sangat penting di era globalisasi ini.

### SUMBER BACAAN

- Bjork, Christopher (2005): *Indonesian Education; Teacher, Schools, and Central Bureaucracy*. New York and London: Routledge.
- Bourdieu, Pierre dan Passeron (1990): *Reproduction in Education, Society and Culture*. London: Sage Publications.
- Fakih, Mansour, dkk (2001): *Pendidikan Populer; Membangun Kesadaran Kritis*. Yogyakarta: Insist.
- Freire, Paulo (2000): *Pendidikan Kaum Tertindas*. Jakarta: LP3ES.
- Harefa, Andrias (2000): *Menjadi Manusia Pembelajar*. Jakarta: Kompas.
- Jalal, Fasli dan Dedi Supriyadi (2001): *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita.

- Darmaningtyas (2007): “Realitas Pemberlakuan UAN/UN.” *EDUKASI Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*. Vol. 5 (1).
- Illich, Ivan (2000): *Bebaskan Masyarakat dari Belenggu Sekolah*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Nugroho, Benediktus Widi (2008): *Dampak Buruk Ujian Nasional terhadap Siswa, Guru dan Sekolah*. Basis. No. 07-08 (57), Juli-Agustus.
- Smith, William A (2001): *Conscientizacao; Tujuan Pendidikan Paulo Freire*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudjiono, Anas (2001): *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Supriyadi, Dedi (2000): *Mengangkat Citra dan Martabat Guru*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Windhu, Marsana (2000): “Dimensi Kekerasan Tinjauan Teoritis Atas Fenomena Kekerasan”. dalam Suseno, Franz Magnis (ed). *Malawan Kekerasan Tanpa Kekerasan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zakaria, Teuku Ramli (2005): *Ujian Nasional dan Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan*. Jakarta: Pusat Penilaian Pendidikan Balitbang Depdiknas.
- Zamroni, M. Imam (2008)a. “Kesejahteraan Guru Masalah Klasik Pendidikan Kita.” *Harian Seputar Indonesia*, 29 Januari.
- (2008)b. “Wajah Stres Pendidikan Kita.” *Harian Kompas*, 22 April.
- (2008)c. “UN dan Sangkar Besi Pendidikan.” *Harian Seputar Indonesia*, 10 Mei.